**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK, DAN *JOINT AUDIT* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

***THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE, COMPANY SIZE, POLITICAL CONNECTIONS, AND JOINT AUDITS ON TAX AVOIDANCE***

***(CASE STUDY ON MINING SECTOR COMPANIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE, 2017-2019)***

**Winda Erlita (17061054)**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: 17061054@student.mercubuana-yogya.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan *joint audit* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jumlah sampel penelitian ini 27 sampel yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, koneksi politik dan *joint audit* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Implikasi dari penelitian ini yaitu pihak manajemen perlu memperkuat strategi dan rencana dalam perpajakan, sehingga perusahaan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Kata Kunci:**Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik, *joint audit*, dan *tax avoidance*.

***Abstract***

*This study aims to determine the effect of institutional ownership, audit committee, company size, political connections, and joint audit variables on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The number of samples in this study 27 samples obtained using purposive sampling method. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with SPSS 22 application tools.The results of the analysis show that institutional ownership, audit committee, political connections and joint audits have a negative and insignificant effect on tax avoidance, while firm size shows positive and significant results. tax avoidance. The implication of this research is that management needs to strengthen strategies and plans in taxation, so that the company does not violate tax laws and regulations.*

***Keywords:*** *Institutional Ownership, Audit Committee, Company Size, Political Connection, joint audit, and tax avoidance*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan utama negara terdapat di perpajakan, pajak pusat terdiri dari; PPh, PPN, bea materai, bea dan cukai, PBB, serta pajak lainnya termasuk pajak perdagangan internasional. Selain itu, anggaran penerimaan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak seperti migas dan nonmigas. Realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1,786,3 triliun rupiah. Dengan ditargetkannya APBN diharapkan Diretorat Jendral Pajak (DJP) dapat mencapai target yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015-2018. Pada periode tahun 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1,489,3 triliun, 2016 sebesar Rp. 1,538,2 triliun, 2017 sebesar Rp. 1,472,7 dan periode tahun 2018 sebesar Rp. 1,618,1. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan pada periode tahun 2015-2018 tidak mencapai target yang maksimal. Penerimaan pajak di Indonesia belum bisa mencapai target yang maksimal seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Meski begitu penerimaan perpajakan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak ialah *tax avoidance,* menurut (Pohan, 2016) *Tax Avoidance* adalah usaha untuk melakukan pengefisienan terhadap biaya pajak terutang dengan cara melakukan penghindaran pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada pembayaran yang bukan objek pajak. *Tax avoidance* termasuk tindakan penghindaran pengenaan pajak yang legal menurut hukum. Meskipun tindakan tersebut harus dihindari oleh wajib pajak, namun *tax avoidance* tetap dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* antara lain; kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan *joint audit.*

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan Jensen dan Meckling (1976) (dalam Wedhar, 2017). Konfik pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principle* (Wedhar, 2017). Keterkaitan antara teori keagenan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dari berbagai pihak, baik pihak pemegang saham (prinsipal) itu sendiri ataupun masalah yang terjadi antara prinsipal dengan manajemen perusahaan. Benturan kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham biasanya karena terdapat perbedaan mengenai metode *tax avoidance* dan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*  yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya dari pihak pemegang saham menginginkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi rendah dengan cara mengalihkan aset perusahaan sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan mengurangi beban pajaknya dengan cara meningkatkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila terjadi masalah keagenan, maka akan muncul *agency cost* yang harus dikeluarkan oleh pihak prinsipal agar dalam melakukan pengelolaan perusahaan tidak terjadi kecurangan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pohan, (2016) mengatakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pajak perencanaan manajemen perpajakan sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasikan beban pembayaran pajak untuk dari kewajiban perpajakan melainkan menekankan beban pajak melalui cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal; *tax saving, tax avoidance, tax evasion,* penundaan atau penggeseran pembayaran pajak, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar dan lain sebagainya.

*Tax avoidance* yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki (Melisa & Tandean, 2017). Jasmine, (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. *Tax avoidance* legal dilakukan jika tidak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, namun jika *tax avoidance* melebihi batas yang ditentukan maka tindakan tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *tax avoidance*; kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *joint audit*.

Kepemilikan institusional adalah suatu proporsi kepemilikan saham institusi yaitu institusi pendiri perusahaan, yang bukan merupakan institusi pemegang saham publik dan diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Kepemilikan institusional berperan penting dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong pengawasan yang lebih optimal (Fadila, 2017). Keberadaan pihak institusional dalam suatu perusahaan tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka semakin rendah pula tindakan *tax avoidance*. Banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka manajemen akan membuat kebijakan dan strategi perpajakan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya saham istimewa yang dimiliki oleh pihak institusi maka tingkat *tax avoidance* disuatu perusahaan akan semakin rendah dikarenakan pihak institusi menginginkan laba yang besar sehingga pajak yang dibayarkan akan semakin besar pula. (Diantari & Ulupui, 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Komite audit Komite audit yang juga disebut sebagai komite tambahan memiliki tujuan untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari kecurangan pihak manajemen. Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Semakin banyak keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan kualitas perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. (Diantari & Ulupui, 2016) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu proporsi yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa cara, antara lain: total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Tandean, 2016). Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik. Tandean, (2016) dan Jasmine, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance.*

Perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya pemerintah memiliki kaitan yang rendah risikonya dengan *tax avoidance* (Tehupuring & Rossa, 2016)*.* Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 22/PMK.03/2020 mengenai hubungan istimewa. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Putri, 2017) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Joint audit* adalah audit atas badan hukum yang diaudit oleh dua atau lebih auditor untuk menghasilkan satu laporan audit, sehingga auditor berbagi tanggung jawab atas audit tersebut (En.wikipedia.org, 2020). Menurut Ratzinger-Sakel et al. (2013:176) dalam (Ajili & Khlif, 2020) mendefinisikan *joint audit* sebagai laporan keuangan diaudit oleh dua atau lebih auditor independen dengan cara yang melibatkan: koordinasi perencanaan audit; upaya audit bersama; tinjauan silang dan kontrol kualitas bersama; dan penerbitan satu laporan auditor tunggal yang ditandatangani oleh auditor yang bertanggung jawab secara bersama. Penelitian yang dilakukan oleh (Ajili & Khlif, 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *joint audit* dengan *tax avoidance*.

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H4 : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H5 : *Joint audit* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan *joint audit* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* dan *sustainability report* yang didapat melalui web www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk mengambil sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*). Tingkat *tax avoidance* yang rendah digambarkan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang tinggi sebaliknya Tingkat *tax avoidance* yang tinggi ditunjukkan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang rendah. Tarif pajak penghasilan untuk badan adalah sebesar 25% maka apabila persentase *Cash Effective Tax Rate* (CETR) mendekati 25% maka tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah (Dewinta & Setiawan, 2016). Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan memperhitungkan *Cash Effective Tax Rate* (*CETR*). CETR adalah model yang digunakan dalam penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) yaitu:

$$Cash ETR=\frac{Pajak yang dibayarkan}{Laba sebelum pajak}$$

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik dan *joint audit* dimana mekanisme pengukurannya menggunakan: 1) Kepemilikan institusional diproksikan menggunakan presentase jumlah saham. 2) komite audit diukur menggunakan variabel dummy, dimana jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0. 3) ukuran perusahaan diproksikan menggunakan jumlah total aset. 4) koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy, dimana nilai 1 untuk kepemilikan saham diatas 10% dan nilai 0 untuk kepemilikan saham dibawah 10%. 5) *joint audit* diukur menggunakan variabel dummy yang nilainya sama dengan 1 jika laporan audit yang diterbitkan ditandatangani oleh dua auditor eksternal dan 0 sebaliknya.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 22. Adapun persamaan persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR=α+ β₁KEPINS+β₂KA+ β₃SIZE+β₄KP+ β₅JA+εi$$

Keterangan:

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

$α$ = Konstanta

$β₁ ,β₂ ,β₃ ,β₄ ,β₅$ = Koefisien regresi

KEPINS = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

SIZE = Ukuran Perusahaan

KP = Koneksi Politik

JA = *Joint Audit*

$εi$ = Standar Eror

 Secara statistik pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat diukur menggunakan nilai statistik t (uji parsial t) dengan tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, dan tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| KEPINS | 27 | .04 | 6.76 | 1.9211 | 2.14340 |
| KA | 27 | .00 | 1.00 | .8889 | .32026 |
| SIZE | 27 | .10 | 3.00 | 1.6548 | 1.05267 |
| KP | 27 | .00 | 1.00 | .5556 | .50637 |
| JA | 27 | .00 | 1.00 | .5556 | .50637 |
| CETR | 27 | .09 | .72 | .3363 | .15817 |
| Valid N (listwise) | 27 |  |  |  |  |

**Statistik Deskriptif**

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 27 data dari 9 perusahaan. Variabel dependen menunjukkan nilai minimum sebesar 0.09% yang mengindikasikan semakin kecil peluang terjadinya *tax avoidance*. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.72% mengindikasikan tingginya kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Nilai rata-rata CETR pada penelitian ini sebesar 0.3363% yang menunjukkan bahwa potensi terjadinya *tax avoidance* pada peerusahaan cukup tinggi. Variabel independen kepemilikan institusional (KEPINS) memiliki nilai minimum sebesar 0,04% dan nilai maksimum sebesar 6,76%. Sementara nilai standar deviasi sebesar 2,14340% dan nilai rata-rata sebesar 1,9211%. Variabel Independen komite audit (KA) mempunyai nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 1,00%. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,3206% dan nilai rata-rata sebesar 0,8889%. Variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai nilai minimum sebesar 0,10% dan nilai maksimum sebesar 3,00%. Sementara nilai standar deviasi sebesar 1,05267% dan nilai rata-rata sebesar 1,6548%. Variabel independen koneksi politik (KP) memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 1,00%. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,50637% dan nilai rata-rata sebesar 0,5556%. Variabel independen *joint audit* (JA) mempunyai nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 1,00%. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,50637% dan nilai rata-rata sebesar 0,5556%.

**Tabel 1
Hasil Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| ***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 27 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | .12029159 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .140 |
| Positive | .140 |
| Negative | -.116 |
| Test Statistic | .140 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .190c |

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,140 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,190 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yakni 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

**Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
|  | Collinearity Statistics |
| Model  | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
|  | KEPINS | .438 | 2.281 |
|  | KA | .356 | 2.811 |
|  | SIZE | .616 | 1.622 |
|  | KP | .800 | 1.250 |
|  | JA | .602 | 1.660 |

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* pada variabel KEPINS sebesar 0,438, KA sebesar 0,356, SIZE sebesar 0,616, KP sebesar 0,800, dan JA sebesar 0,602, dimana nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF pada variabel KEPINS sebesar 2,281, KA sebesar 2,811, SIZE sebesar 1,622, KP sebesar 1,250, dan JA sebesar 1,660, dimana nilai-nilai tersebut lebih kecil dari 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| Runs Test |
|  | Unstandardized Residual |
| Test Valuea | -.01006 |
| Cases < Test Value | 13 |
| Cases >= Test Value | 14 |
| Total Cases | 27 |
| Number of Runs | 17 |
| Z | .793 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .428 |

Tabel 4 menunjukkan bahwa uji *Runs Test* menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,428. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya, tidak terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini.



**Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 1 dapat diketahui bahwa grafik tidak menunjukkan adanya suatu pola yang jelas dan titik-titik pada hasil pengujian diatas menyebar secara acak baik dibawah maupun diatas nilai 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

**Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

|  |
| --- |
| Coefficientsa |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .122 | .143 |  | .854 | .403 |
| KEPINS | -.010 | .018 | -.137 | -.546 | .591 |
| KA | .092 | .137 | .186 | .670 | .510 |
| SIZE | .105 | .032 | .702 | 3.319 | .003 |
| KP | -.109 | .058 | -.350 | -1.885 | .073 |
| JA | .069 | .067 | .221 | 1.034 | .313 |

Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR=0,122-0.010 KEPINS+0,92 KA+0,105 SIZE-0,109 KP+0,69 JA+εi$$

Keterangan :

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

$α$ = Konstanta

$β₁ ,β₂ ,β₃ ,β₄ ,β₅$ = Koefisien regresi

KEPINS = Kepemilikan Institusional

KA = Komite Audit

SIZE = Ukuran Perusahaan

KP = Koneksi Politik

JA = *Joint Audit*

$εi$ = Standar Eror

Nilai konstanta dari persamaan tersebut yaitu 0,122 artinya jika nilai KEPINS (X1), KA (X2), SIZE (X3), KP (X4) dan JA (X5) nilainya sama dengan 0, maka nilai CETR (Y) adalah 1,22%.

**Tabel 4. 7
Hasil Uji Parsial (t)**

|  |
| --- |
| Coefficientsa |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 |  (Constant) | .122 | .143 |  | .854 | .403 |
|  KEPINS | -.010 | .018 | -.137 | -.546 | .591 |
|  KA | .092 | .137 | .186 | .670 | .510 |
|  SIZE | .105 | .032 | .702 | 3.319 | .003 |
|  KP | -.109 | .058 | -.350 | -1.885 | .073 |
|  JA | .069 | .067 | .221 | 1.034 | .313 |

Uji statistik t bernilai negatif dengan nilai Sig. sebesar 0,591 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional(KEPINS) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR) ditolak. Hal itu terjadi karena pemilik institusional juga ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi *tax avoidance*.

Uji statistik t bernilai positif dengan Sig. sebesar 0,510 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (CETR) ditolak. Hal ini dikarenakan pembentukan komite audit perusahaan hanya dilakukan untuk memenuhi peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 55/POJK.04/2015 yang membahas tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit, yang kedua karena komite audit tidak ikut berperan aktif dalam pengambilan kebijakan perusahaan, sehingga besar kecilnya jumlah komite audit tidak dapat mengintervensi kebijakan pajak perusahaan yang terkait dengan aktivitas *tax avoidance*.

Uji statistik t bernilai positif dengan Sig. sebesar 0,003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* CETR diterima, karena semakin besar perusahaan maka akan menghasilkan laba besar pula dengan meningkatnya jumlah laba maka perusahaan akan membayar beban pajak yang tinggi pula.

Uji statistik t bernilai negatif dengan Sig. sebesar 0,073 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian H4 yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (CETR) ditolak. Hal ini terjadi karena perusahaan akan memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah untuk mencari celah dalam perundang-undangan agak dapat memperkecil pembayaran beban pajak.

Uji statistik t bernilai positif dengan Sig. sebesar 0,313 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *joint audit* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Dengan demikian H5 yang menyatakan bahwa *joint audit* berpengaruh signifikan terhadap CETR ditolak. *Joint audit* tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pihak manajemen sehingga ada atau tidaknya *joint audit* dalam perusahaan tidak akan memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan *joint audit* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Variabel kepemilikan institusional memiliki arah negatif dan tidak signifikan artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. 2) Variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* 3) Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. 4) Variabel koneksi politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* 5) Variabel *joint audit* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat menambah pengawasan pihak fiskus pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki banyak celah untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan manajemen perpajakan dalam melakukan perencanaan perpajakan, sehingga aktivitas *tax avoidance* tidak akan terjadi.

1. Bagi Peneliti
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lainnya untuk melihat *tax avoidance*  dalam beberapa sudut pandang seperti ETR, *Current* ETR, *Book Tax Difference* (BTD),GAAP ETR.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian bukan hanya pada perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah, melainkan seluruh perusahaan pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah dan dolar untuk meneliti *tax avoidance*.
4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel independen lainnya seperti; profitabilitas (ROA), *leverage*, kualitas audit, kompensasi kerugian fiskal, proporsi komisaris independen, *corporate governance*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, *27*(1), 155–171. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015

Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN*. *9*(3), 187–200. https://doi.org/DOI : https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200

Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE* (Vol. 14).

Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(1), 702–732.

En.wikipedia.org. (2020). *Joint Audit*. https://en.wikipedia.org/wiki/Joint\_audit#:~:text=Jump to navigation Jump to search. A joint,performed jointly and fieldwork allocated to the auditors.

Fadila, M. (2017). PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *JOM Fekon*, *4*(1), 1859–1872.

Jasmine, U. (2017). *PENGARUH LEVERAGE, KEPELIMIKAN INSTITUSONAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)* (Vol. 4, Issue 1). Faculty of Economics Riau University.

Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. . A. D. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Pajak ada* (Vol. 18).

Melisa, M., & Tandean, V. A. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *Vol.8 No.1*.

Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis) Edisi Revisi*. PT.Gramedia Jakarta.

Tandean, V. A. (2016). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN PENGARUHNYA PADA TAX AVOIDANCE* (Vol. 11, Issue 1).

Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.

Wedhar, S. (2017). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi*.

www.idx.co.id. (n.d.). *Bursa efek indonesia*. https://www.idx.co.id/